

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta: Ford Foundation.
- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adami, Chazawi. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ali, Farid. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Bandung: Refika Aditama.
- Ateng, Syarifudin. 1994. "Kepala Daerah", Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- A. Hamid. 1993. Attamimi, *Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijaksanaan/Hukum Pengaturan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, Jakarta.
- Bedner, Adriaan, *Shopping Forums on Indonesia's Administrative Courts* (Utrecht, t.th).
- C.S.T. Kansil. 1995. "Latihan Ujian Hukum Pidana", Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan . 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- F.H. Van der Burg dan G.J.M. Cartigny. 1994. dalam buku: Bolt, *Perijinan Yang*

Melawan.

Gultom, Maidin .2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika

Aditama.

HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Marlina. 2009. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Marbun SF. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di*

Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.

Muin Fahmal. 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam*

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Cetakan Pertama, UII Press,

Yogyakarta.

Ni'matul Huda. 2011. "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Nusantara, Abdul G. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh

Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali.

Olden Bidara, "*Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Teori dan*

Paulus Effendi Lotulung, 1994. *Himpunan Makalah Asas-asas Umum*

Pemerintah Yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soetjipto Rahardjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo. 2000 . *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tuti, Triwulan, Titik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paasca-*

Amandemen UUD 1945, Jakarta. Kencana.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Instruksi Presiden No 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang Kejahatan Seksual.

Pranala Luar

Wikipedia.2019."Kasus Pelecehan Seksual di JIS",2019,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_pelecehan_seksual_di_JIS, diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 17.00 WIB.

TC-Thareq,Akmal Hibatul,"Kenali Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi",<https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/26/perbedaan-grasi-amnesti-abolisi-dan-rehabilitasi/>, Di akses pada tanggal 08 Oktober 2019,

pukul 20.30 WIB.

Hendri, Mahdi, "*Asas umum pemerintahan yang baik*",

<https://www.kompasiana.com/tenderwatch/54ff81d70a33311494c5103fe/asas-umum-pemerintahan-yang-baik>, Di akses pada tanggal 20 November 2019, pukul 01.35 WIB.

Mariana, Amirrudin, "*Akibat tidak mengenal istilah korban*"

"<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenal-istilah-korban-victim>, di akses pada tanggal 20 November 2019 pukul 01.35 WIB.

Wikipedia, "*Terdakwa*", <https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa>, Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 2.59 WIB.

Wikipedia, "*Preogatif*", <https://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif>, Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 3.07 WIB.

Smart Legal, "*Kenali Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi*",

<https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/26/perbedaan-grasi-amnesti-abolisi-dan-rehabilitasi/>, Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 03.10 WIB.

Johan Art Unpal, "*Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945*", [http://](http://johanunpal.blogspot.co.id/2014/04/hak-prerogatif-presiden-menurut-uud-1945_4.html)

johanunpal.blogspot.co.id/2014/04/hak-prerogatif-presiden-menurut-uud-1945_4.html, diunduh pada tanggal 22 November 2019 pukul 19.30 WIB.

"*Prerogative The Free Dictionary*", [http://legal-dictionary.thefreedictionary.](http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prerogative)

[com/prerogative](http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prerogative)", diunduh pada tanggal 26 November 2019 pukul 19.30

WIB.

Hasan,Basri.2019.” *KEWENANGAN KONSTITUSIONAL (HAK PREROGRAFIF) PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA ATAS KASUS NARKOBA*”, file:///C:/Users/Asus/Downloads/1186-2861-1-SM%20(2).pdf, diakses pada Tanggal 10 Januari 2020, pukul 20.00 WIB.

